



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya daerah yang efektif dan efisien untuk pemenuhan tata kelola pemerintah yang baik;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya inflasi perekonomian masyarakat serta dalam rangka mendorong daya saing daerah dan kemampuan daerah dalam memaksimalkan *local taxing power*, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa pada saat ini Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 sudah tidak relevan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 710, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 192) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Umum

Dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat serta dalam rangka mendorong daya saing daerah dan kemampuan daerah dalam memaksimalkan *local taxing power*, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dituntut memperluas objek pajak daerah, menambah jenis pajak daerah, menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai bagian dari kebijakan harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target sebagai acuan untuk mencapai kinerja tertentu.

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota Cimahi mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong daya saing daerah dan kemampuan daerah dalam memaksimalkan *local taxing power* disegala sektor, dimana pemulihan ekonomi serta daya saing daerah dan kemampuan daerah dalam memaksimalkan *local taxing power* di masyarakat ini berdampak terhadap target pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Desember 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR


LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 24 TAHUN 2023
: 19 Desember 2023
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TARGET
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2023	Target Penerimaan Perubahan Tahun Anggaran 2023	Target Penerimaan Per Triwulan																Perangkat Daerah Penungut
				Tahun Anggaran 2023																
				Triwulan I		Triwulan II		s.d. Triwulan II		Triwulan III		s.d. Triwulan III		Triwulan IV		s.d. Triwulan IV				
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	193.815.900.411.00	205.298.615.915.00	52.912.247.145.00	27.30	43.832.184.081.00	22.62	96.744.431.226.00	49.92	54.760.942.552.00	28.25	151.450.694.128.00	78.17	53.847.921.787.00	21.83	205.298.615.915.00	100.00	Bappenda		
I.	Pajak Daerah	180.651.551.266.00	193.265.398.170.00	50.009.263.359.00	27.68	40.740.076.295.00	22.55	90.749.339.654.00	50.23	51.390.638.766.00	28.45	142.085.298.770.00	78.68	51.180.099.400.00	21.32	193.265.398.170.00	100.00	Bappenda		
1	Pajak Hotel	295.703.216.00	410.652.716.00	71.328.375.00	24.12	75.924.025.00	25.68	147.252.400.00	49.80	85.106.375.00	28.78	177.679.125.00	78.58	232.973.591.00	21.42	410.652.716.00	100.00	Bappenda		
2	Pajak Restoran	22.700.068.689.00	24.951.164.757.00	5.814.625.000.00	25.62	6.259.958.500.00	27.58	12.074.583.500.00	53.19	6.144.607.500.00	27.07	18.219.191.000.00	80.26	6.731.973.757.00	19.74	24.951.164.757.00	100.00	Bappenda		
3	Pajak Hiburan	150.000.000.00	300.000.000.00	23.000.000.00	15.33	51.678.399.00	34.45	74.678.399.00	49.79	45.160.000.00	30.11	119.838.399.00	79.89	180.161.601.00	20.11	300.000.000.00	100.00	Bappenda		
4	Pajak Reklame	3.090.000.000.00	4.125.214.200.00	736.223.005.00	23.83	749.051.830.00	24.24	1.485.274.835.00	48.07	801.330.421.00	25.93	2.286.605.256.00	74.00	1.838.608.944.00	26.00	4.125.214.200.00	100.00	Bappenda		
5	Pajak Penerangan Jalan	40.628.273.035.00	41.269.473.535.00	10.002.523.465.00	24.62	9.502.523.465.00	23.39	19.505.046.930.00	48.01	10.102.523.465.00	24.87	29.607.570.395.00	72.87	11.661.903.140.00	27.13	41.269.473.535.00	100.00	Bappenda		
6	Pajak Parkir	960.500.000.00	1.043.751.000.00	245.000.000.00	25.51	255.000.000.00	26.55	500.000.000.00	52.06	255.000.000.00	26.55	755.000.000.00	78.60	288.751.000.00	21.40	1.043.751.000.00	100.00	Bappenda		
7	Pajak Air Tanah	18.577.006.326.00	19.351.951.648.00	4.731.563.514.00	25.47	4.909.940.076.00	26.43	9.641.503.590.00	51.90	5.288.911.005.00	28.47	14.930.414.595.00	80.37	4.421.537.053.00	19.63	19.351.951.648.00	100.00	Bappenda		
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	39.000.000.000.00	41.860.846.904.00	8.385.000.000.00	21.50	10.686.000.000.00	27.40	19.071.000.000.00	48.90	12.168.000.000.00	31.20	31.239.000.000.00	80.10	10.621.846.904.00	19.90	41.860.846.904.00	100.00	Bappenda		

NO	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2023	Target Penerimaan Perubahan Tahun Anggaran 2023	Target Penerimaan Per Triwulan												Pangkat Berah Pemungut									
				Tahun Anggaran 2023																					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV												
				Rp	%		Rp	%		Rp	%		Rp	%											
1		2	3	3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.	55,250,000,000.00	59,952,343,410.00	20,000,000,000.00	36.20		8,250,000,000.00	14.93		28,250,000,000.00	51.13		16,500,000,000.00	29.86		44,750,000,000.00	81.00		15,202,343,410.00	19.00		59,952,343,410.00	100.00		Bappenda
10	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
Pemerintah Kota Cimahi,

DUDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 24 TAHUN2023
: 19 Desember 2023
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TARGET
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Jenis Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2023	Target Penerimaan Perubahan Tahun Anggaran 2023	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2023												Perangkat Daerah Pertungut		
				Tahun Anggaran 2023														
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
				Rp	%		Rp	%		Rp	%		Rp	%				
	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Retribusi Daerah	13,164,349,145.00	12,033,217,745.00	2,902,983,786.00	22.05	3,092,107,786.00	23.49	5,995,091,572.00	45.54	3,370,303,786.00	25.60	9,365,395,358.00	1.14	2,667,822,387.00	28.86	12,033,217,745.00	100.00	
A	Retribusi Jasa Umum	5,379,430,000.00	5,352,248,600.00	1,239,530,000.00	23.04	1,442,050,000.00	26.81	2,681,580,000.00	49.85	1,274,550,000.00	23.69	3,956,130,000.00	3.54	1,396,118,600.00	26.46	5,352,248,600.00	100.00	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2,000,000,000.00	2,100,000,000.00	499,800,000.00	25.00	499,800,000.00	25.00	999,600,000.00	50.00	499,800,000.00	24.99	1,499,400,000.00	4.99	600,600,000.00	25.01	2,100,000,000.00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	150,000,000.00	150,000,000.00	35,000,000.00	23.33	40,000,000.00	26.67	75,000,000.00	50.00	37,500,000.00	25.00	112,500,000.00	5.00	37,500,000.00	25.00	150,000,000.00	100.00	DPKP
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850,000,000.00	800,000,000.00	205,000,000.00	24.12	200,000,000.00	23.53	405,000,000.00	47.65	225,000,000.00	26.47	630,000,000.00	74.12	170,000,000.00	25.88	800,000,000.00	100.00	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1,000,000,000.00	967,248,600.00	250,000,000.00	25.00	250,000,000.00	25.00	500,000,000.00	50.00	250,000,000.00	25.00	750,000,000.00	75.00	217,248,600.00	25.00	967,248,600.00	100.00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian
5	Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	160,000,000.00	160,000,000.00	25,000,000.00	15.63	35,000,000.00	21.88	60,000,000.00	37.50	40,000,000.00	25.00	100,000,000.00	62.50	60,000,000.00	37.50	160,000,000.00	100.00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600,000,000.00	550,000,000.00	157,000,000.00	26.17	150,000,000.00	25.00	307,000,000.00	51.17	155,000,000.00	25.83	462,000,000.00	77.00	88,000,000.00	23.00	550,000,000.00	100.00	Dinas Perhubungan
7	Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	125,000,000.00	125,000,000.00	31,250,000.00	25.00	31,250,000.00	25.00	62,500,000.00	50.00	31,250,000.00	25.00	93,750,000.00	75.00	31,250,000.00	25.00	125,000,000.00	100.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

8	Retribusi Pengcailian Menara Telekomunikasi	350,000,000.00	350,000,000.00	-	200,000,000.00	57.14	-	-	200,000,000.00	57.14	150,000,000.00	42.86	350,000,000.00	100.00	Diskominfo
9	Retribusi Penyediaan dan/jatau Penyedotan Kakus	90,430,000.00	96,000,000.00	25.41	22,500,000.00	24.88	22,500,000.00	24.88	67,980,000.00	75.17	28,020,000.00	24.83	96,000,000.00	100.00	DPKP
10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	54,000,000.00	54,000,000.00	25.00	27,000,000.00	50.00	13,500,000.00	25.00	40,500,000.00	75.00	13,500,000.00	25.00	54,000,000.00	100.00	DPKP
B	Retribusi Jasa Usaha	4,899,419,145.00	4,919,419,145.00	24.72	1,197,807,786.00	24.45	1,242,903,786.00	25.37	3,651,915,358.00	74.54	1,267,503,787.00	25.46	4,919,419,145.00	100.00	
1	Retribusi Terminal	250,000,000.00	220,000,000.00	24.60	62,803,000.00	25.12	63,199,000.00	25.28	187,501,000.00	75.00	32,499,000.00	25.00	220,000,000.00	100.00	Dinas Perhubungan
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4,604,419,145.00	4,654,419,145.00	24.73	1,123,754,786.00	24.41	1,168,454,786.00	25.38	3,430,664,358.00	4.51	1,223,754,787.00	25.49	4,654,419,145.00	100.00	
	Penggunaan rusunawa	3,166,899,145.00	3,166,899,145.00	25.00	791,724,786.00	25.00	791,724,786.00	25.00	2,375,174,358.00	75.00	791,724,787.00	25.00	3,166,899,145.00	100.00	DPKP
	Pemakaian Peralatan, ruangan Puskewan	262,520,000.00	262,520,000.00	24.94	65,780,000.00	25.06	65,480,000.00	24.94	196,740,000.00	74.94	65,780,000.00	25.06	262,520,000.00	100.00	Dispangtan
	Penggunaan Laboratorium Lingkungan	525,000,000.00	575,000,000.00	25.00	131,250,000.00	25.00	131,250,000.00	25.00	393,750,000.00	75.00	181,250,000.00	25.00	575,000,000.00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup
	Penggunaan Ruangar BITC	650,000,000.00	650,000,000.00	23.08	135,000,000.00	20.77	180,000,000.00	27.69	465,000,000.00	71.54	185,000,000.00	28.46	650,000,000.00	100.00	Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian
	Penggunaan Stoom V/ais dan mesin coring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sewa Toko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45,000,000.00	45,000,000.00	25.00	11,250,000.00	25.00	11,250,000.00	25.00	33,750,000.00	75.00	11,250,000.00	25.00	45,000,000.00	100.00	
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	2,885,500,000.00	1,761,550,000.00	15.67	452,250,000.00	15.67	852,850,000.00	29.56	1,757,350,000.00	60.90	4,200,000.00	39.10	1,761,550,000.00	100.00	
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00	22.50	450,000,000.00	22.50	500,000,000.00	25.00	1,400,000,000.00	70.00	-	30.00	1,400,000,000.00	100.00	DPMP TSP

2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10,500,000.00	11,550,000.00	2,250,000.00	21.43	2,250,000.00	21.43	4,500,000.00	42.86	2,850,000.00	27.14	7,350,000.00	70.00	4,200,000.00	30.00	11,550,000.00	100.00	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	875,000,000.00	350,000,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000,000.00	40.00	350,000,000.00	40.00	-	60.00	350,000,000.00	100.00	Dinas Tenaga Kerja

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 19 Desember 2023



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN